

Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Mitigasi Bencana Erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Magelang

Izma Fatima, Desiderius Priyo Sudibyo

Program Studi Ilmu Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret
Email: izmafatima17@student.uns.ac.id

Abstrak

Permasalahan pada saat mitigasi bencana juga menjadi tantangan tersendiri karena paradigma kebencanaan yang kini bergeser dari yang tadinya hanya terbatas pada tanggap darurat saja kini telah fokus ke arah pengurangan risiko. Namun pada kenyataannya mitigasi bencana masih banyak mengalami kendala di lapangan, sehingga tujuan organisasi yang diharapkan terkadang tidak sesuai dengan hasil. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang dalam mitigasi bencana erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Magelang serta untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi efektivitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan BPBD Kabupaten Magelang sudah bisa dikatakan efektif namun perlu dilakukan peningkatan. Terdapat faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi yakni faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong yaitu pembagian wewenang, pemberian motivasi, peningkatan kualitas pegawai, dan SOP yang digunakan. Sementara untuk faktor penghambatnya yaitu kekurangan pegawai dan peralatan dan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal mitigasi bencana terutama anak remaja.

Kata Kunci: Efektivitas Organisasi; BPBD; Mitigasi Bencana

Abstract

Problems during disaster mitigation are also a challenge in itself because the paradigm of disaster is now shifting from what was previously limited to emergency response, now it is focused on reducing risk. However, in reality disaster mitigation still faces many obstacles in the field, so that the expected organizational goals are sometimes not in accordance with the results. The aim of this study was to analyze the effectiveness of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Magelang Regency in mitigating the eruption of Mount Merapi in Magelang Regency and to find out the factors that influence effectiveness. The method used in this research is descriptive qualitative. The results of the study showed that the BPBD of Magelang Regency can be said to be effective but needs to be improved. There are factors that influence organizational effectiveness, namely driving factors and inhibiting factors. The driving factors are the distribution of authority, giving motivation, improving the quality of employees, and the SOP used. As for the inhibiting factors, namely the lack of staff and equipment and the lack of public awareness in terms of disaster mitigation, especially teenagers.

Keywords: Organizational Effectiveness; BPBD; Disaster mitigation

Pendahuluan

Indonesia berada di daerah tektonik aktif yang memiliki tiga lempeng aktif utama yaitu: bagian utara yakni Eurasia, bagian Selatan yakni Samudera Hindia dan Australia, serta pada bagian timur adalah Lempeng Pasifik. Pada bagian timur serta selatan negara Indonesia menunjukkan adanya lengkungan vulkanik yang membentuk bentangan dari ujung Pulau Sumatera, kemudian Jawa, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Kepulauan Sulawesi. Oleh karena itu, Indonesia memiliki sekitar lebih dari 500 gunung berapi muda (Maumoon Abdul Gayoom, 2010:7). Gunung api Indonesia ialah bagian dari rangkaian gunung api Asia-Pasifik, yang dikenal sebagai Cincin Api atau rangkaian sirkum-pasifik. Dengan 127 gunung berapi aktif, atau 13% dari seluruh gunung berapi aktif di seluruh dunia, Indonesia termasuk negara yang memiliki jumlah gunung berapi aktif terbanyak. Sekitar 60% di antaranya merupakan gunung berapi yang berpotensi berbahaya bagi masyarakat yang tinggal di lokasi yang sering terjadi letusan gunung berapi tak terkecuali di Kabupaten Magelang (BNPB, 2016:70).

Kabupaten Magelang terletak di kawasan Gunung Merapi yang masih aktif sampai sekarang. Hal inilah yang menyebabkan Kabupaten Magelang sering mengalami bencana erupsi merapi. Menurut laporan BMKG, antara setiap dua dan setiap lima tahun Gunung Merapi yang berada di daerah permukiman padat penduduk mengalami erupsi (puncak keaktifan). Sejak tahun 1548 gunung api di bagian tengah Pulau Jawa tersebut sudah meletus sebanyak 68 kali (Magmaindonesia, 2019:1). Wilayah Kabupaten Magelang terdiri dari 21 kecamatan, 367 desa dan 5 kelurahan. Tiga kecamatan yang termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana (KRB) III erupsi Gunung Merapi, yakni Kecamatan Srumbung dengan delapan desa, Kecamatan Dukun dengan sepuluh desa dan Kecamatan Sawangan dengan tiga desa (perbup Magelang No 6 Tahun 2021).

Aktivitas Erupsi Gunung Merapi sebagai ancaman yang sewaktu-waktu dapat membahayakan penduduk sekitar dan termasuk dalam bencana permanen yang sudah seharusnya memerlukan perhatian khusus. Pemerintah Kabupaten Magelang perlu membuat sistem perencanaan pembangunan sehingga dampak bencana tersebut tidak bertambah luas. Adanya pergeseran paradigma kebencanaan dari yang hanya penanganan kedaruratan dan pemberian bantuan setelah bencana, kini berfokus kepada paradigma pengurangan risiko bencana yang diwujudkan melalui kesiapan pemerintah dan masyarakat. Selain itu, perubahan paradigma dalam manajemen bencana telah mengubah cara pandang manajemen bencana, baik saat ini maupun di masa depan, penanggulangan bencana akan dianggap sebagai upaya yang bergantung pada manajemen risiko atau tahap pra bencana (Nisa, F, 2014:107-108). Kini perubahan cara pandang dalam penanggulangan bencana telah terintegrasikan dalam perencanaan pembangunan daerah dan nasional.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengatur pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Maka diharapkan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana akan menjadi semakin baik. Manajemen bencana yang ditargetkan dilakukan secara terarah mulai prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana. Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Sebagai tindak lanjut penetapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2011, telah dilantik pejabat struktural pada BPBD tanggal 22 Oktober 2011 dan mulai tanggal tersebut BPBD Kabupaten Magelang telah berfungsi dan melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya. (Dikutip dari bpb.d.kab.go.id, 2019).

Erupsi Gunung Merapi ini memberikan dampak yang luar biasa terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya, yang dapat dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mengurangi dampak erupsi tersebut adalah dengan upaya pengurangan risiko bencana. Namun, hingga saat ini, masyarakat masih belum memahami bencana termasuk yang bertempat tinggal di daerah rawan bencana erupsi Gunung Merapi. Hal tersebut disebabkan kurangnya mitigasi bencana yang tidak menjangkau semua lokasi wilayah di dekat zona rawan bencana dan lingkungan pemerintah. Mitigasi bencana sendiri adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Berdasarkan wawancara pra penelitian yang dilakukan pada tanggal 13 Januari 2023 dengan Analisis mitigasi bencana BPBD Kabupaten Magelang fenomena permasalahan yang berhubungan dengan mitigasi bencana erupsi Gunung Merapi oleh BPBD Kabupaten Magelang adalah belum optimalnya pelaksanaan mitigasi bencana Gunung Merapi dengan stakeholder terkait, masih terbatasnya jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat di daerah rawan bencana Gunung Merapi di Kabupaten Magelang, sistem informasi dan komunikasi kebencanaan belum terbangun secara terpadu dan terintegrasi hal itu di sebabkan oleh masyarakat di KRB III erupsi Gunung Merapi belum familiar dengan media SIKK (Sistem Informasi Kebencanaan Kabupaten) dan Kurangnya pengetahuan dan edukasi masyarakat pada kawasan rawan bencana erupsi Merapi. Kurangnya upaya mitigasi bencana terlihat dari kurangnya usaha pemerintah untuk mengurangi risiko bencana, baik dalam bentuk pembangunan fisik maupun melakukan tindakan untuk menyadarkan masyarakat melalui sosialisasi kebencanaan yang berlangsung secara terus menerus dan konsisten menyebabkan informasi kebencanaan belum bisa dipahami dengan baik (Carolina, M., 2018:7). Kurangnya upaya pada tahap mitigasi bencana tidak dapat diabaikan, serta harus diingat bahwa Kabupaten Magelang merupakan daerah

potensi bencana, terutama daerah yang masuk zona rawan bencana erupsi Gunung Merapi.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu mengkaji secara mendalam mengenai bagaimana efektifitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mitigasi bencana erupsi Gunung Merapi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam melaksanakan mitigasi bencana erupsi Merapi terutama dalam peningkatan SDM masyarakat di Kawasan rawan bencana merapi dan penyebarluasan informasi kebencanaan serta apa saja faktor yang mempengaruhi efektifitas tersebut dengan menggunakan teori efektifitas organisasi Duncen yang terdiri dari:

- a. Pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan berarti bahwa usaha total untuk mencapai tujuan harus dilihat sebagai suatu proses. Pencapaian tujuan terdiri dari sub indikator, yang menjadi dasar bagi kebijakan dukungan, dengan sumber daya pendukung dan periode waktu tertentu.
- b. Integrasi. Sejauh mana suatu organisasi dapat terlibat dalam sosialisasi, pembentukan konsensus, dan komunikasi dengan berbagai organisasi lain diukur dengan integrasinya. Oleh karena itu, koordinasi, sosialisasi, dan komunikasi merupakan bagian dari integrasi.
- c. Adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur yaitu peningkatan kapasitas dan kemampuan, respon pegawai atau staf, dan sarana dan prasarana yang digunakan.

Serta faktor yang mempengaruhi efektifitas organisasi dengan menggunakan teori dari Richard M.Steers yang terdiri dari:

- a. Karakteristik organisasi
Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi organisasi.
- b. Karakteristik Lingkungan
Karakteristik lingkungan mencakup dua aspek yaitu lingkungan intern dan lingkungan ekstern.
- c. Karakteristik Pekerja
Faktor pengaruh penting yang ketiga atas efektifitas adalah para pekerja itu sendiri, baik keterikatannya dengan organisasi maupun prestasi kerjanya.
- d. Karakteristik Kebijakan dan Praktek Manajemen.
Manajer/pimpinan merupakan pemegang peran sentral dan paling besar dalam menentukan kebijakan, prosedur, dan tindakan – tindakan yang mempengaruhi kesanggupan organisasi dalam mencapai tujuannya.

Metode

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magelang. Pemilihan Kabupaten Magelang sebagai lokasi penelitian karena Kabupaten Magelang merupakan daerah rawan bencana terutama bencana erupsi Gunung Merapi. Untuk dapat menjelaskan terkait efektifitas BPBD dalam mitigasi bencana erupsi Gunung Merapi, maka jenis penelitian yang digunakan yaitu Kualitatif Deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Dalam menentukan sampel penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Untuk menguji keabsahan data digunakan triangulasi sumber, dilakukan dengan mengkonfirmasi atau mengecek kembali data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan sumber yang berbeda. Sedangkan dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan model interaktif Miles & Huberman yang diterjemahkan (dalam Sugiyono 2013:246) yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

1. Gambaram Umum

BPBD melaksanakan tanggung jawab penanggulangan bencana dimana membantu Bupati dalam penanggulangan bencana pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana sesuai ketentuan yang berlaku. Penanggulangan bencana di Kabupaten Magelang sebelum terbentuk BPBD dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana khususnya oleh Sub Bidang Penyelamatan dan Rehabilitasi Bidang Penanggulangan Bencana. Sebagai tindak lanjut penetapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2011, telah dilantik pejabat struktural pada BPBD tanggal 22 Oktober 2011 dan mulai tanggal tersebut BPBD Kabupaten Magelang telah berfungsi dan melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya.

2. Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mitigasi bencana erupsi Gunung Merapi di kabupaten Magelang

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan yang harus dipandang sebagai suatu proses. Keseluruhan upaya organisasi wajib ditinjau sebagai suatu proses usaha yang bertahap untuk mendapatkan tujuan, hasil dan target yang diharapkan dengan tepat waktu sehingga dapat dikatakan efektif. Berikut adalah pencapaian tujuan organisasi BPBD Kabupaten Magelang dalam mitigasi bencana erupsi Gunung Merapi.

a. Kebijakan Mitigasi

Berdasarkan hasil penelitian kebijakan yang menjadi dasar dalam kegiatan mitigasi bencana erupsi Gunung Merapi adalah kebijakan di BPBD Kabupaten Magelang berdasarkan UU No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan pembentukan BPBD tersebut berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang. Selain itu Peraturan Menteri ESDM No 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami. Kebijakan tersebut menjadi salah satu dasar dalam melaksanakan mitigasi bencana Gunung Merapi salah satunya yaitu penguatan ketahanan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya masyarakat dalam bentuk sosialisasi edukasi dan penyebaran informasi kebencanaan Gunung Merapi kepada masyarakat terutama masyarakat di kawasan rawan bencana Gunung Merapi.

b. Kuantitas Pegawai

Pegawai memiliki peran penting dalam organisasi. Pegawai secara kuantitas sangat diperlukan guna menunjang keberjalanan pekerjaan di organisasi tersebut. Dengan terpenuhinya kebutuhan pegawai, maka dapat meringankan setiap pekerjaan atau program kegiatan yang dikerjakan. Pegawai BPBD Kabupaten Magelang yang berstatus sebagai ASN belum mencukupi kuantitas pegawai yang dibutuhkan dikarenakan masih banyak jabatan yang belum terpenuhi. Namun dalam teknik keberjalanan menjalankan tugas yang ada pegawai ASN terbantu dalam melaksanakan pekerjaan oleh Non ASN dan THL. Dalam hal teknis di lapangan, BPBD Kabupaten Magelang juga terbantu oleh kehadiran relawan yang jumlahnya banyak dan tersebar di setiap kecamatan di Kabupaten Magelang. Dengan jumlah 64 pegawai disertai relawan dan pihak lain terkait dapat membantu pelaksanaan program mitigasi bencana erupsi Gunung Merapi bahkan setiap bidang saling membantu dibantu juga dengan relawan yang selalu standby di lapangan. Sehingga dari kuantitas pegawai BPBD Kabupaten Magelang dapat dikatakan mencukupi pelaksanaan pekerjaan di BPBD Kabupaten Magelang.

c. Kualitas Pegawai

Tidak sedikit pegawai di BPBD Kabupaten Magelang memiliki latar belakang pendidikan berbeda dengan bidang pekerjaan yang ditekuni dan hanya mengandalkan pengalaman bahkan banyak

pegawai Non ASN lulusan SLTA bisa dikatakan kualitas pegawai belum unggul. Walaupun di beberapa wawancara dengan pegawai BPBD Kabupaten Magelang mengatakan mereka saling membantu dalam hal pekerjaan, dapat bekerja secara mandiri dan mengikuti pelatihan sertifikasi akan tetapi hal tersebut perlu ditingkatkan lagi dan jika bisa semua pegawai ikut merasakan pelatihan jabatan yang tidak hanya sekali dua kali saja tapi konsisten sehingga dapat meningkatkan kualitas pegawai di BPBD Kabupaten Magelang.

d. Ketepatan waktu

Ketepatan waktu pelaksanaan program diperlukan untuk menunjang tercapainya tujuan organisasi agar pelaksanaan program yang sudah direncanakan. Kegiatan peningkatan SDM dalam bentuk sosialisasi dan edukasi sudah berlangsung sesuai dengan waktu yang direncanakan yaitu pada tanggal 8 Februari sampai 17 Maret 2023 sesuai dengan yang ada didokumen RKA dan Anggaran KAS sub Kegiatan Sosialisasi KIE. Kemudian kesesuaian waktu dalam kegiatan penyebaran informasi kebencanaan sudah dirilis melalui media yang dimiliki salah satunya yakni Instagram BPBD Kabupaten Magelang sesuai SOP yang berlaku di BPBD Kabupaten Magelang.

e. Komitmen pegawai

Komitmen adalah bentuk keterikatan antara seseorang untuk melakukan sesuatu. Sama halnya dengan pegawai, mereka sudah berkomitmen dan menjalin keterikatan dengan tempat dimana mereka bekerja dan berkomitmen penuh untuk dapat melaksanakan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Adanya komitmen tersebut maka pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai. Untuk mengetahui komitmen BPBD Kabupaten Magelang dalam melaksanakan tugasnya. BPBD Kabupaten Magelang dalam menjalankan tugasnya sudah berkomitmen penuh dan siap sedia 24 jam jika dibutuhkan dikarenakan ada Surat perintah dari Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Magelang yang mewajibkan piket terkhusus bagi pegawai laki-laki sebagaimana yang telah dijelaskan diatas dan sudah berkomitmen melaksanakan tujuan organisasi dengan penuh tanggungjawab.

2. Integrasi

Integrasi merupakan pengukuran terhadap tingkat kemampuan BPBD Kabupaten Magelang untuk mengadakan koordinasi, sosialisasi, dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Dalam proses integrasi diharapkan organisasi satu dengan yang lain dapat saling

mengisi kebutuhan yang satu dengan yang lainnya. Maka Integrasi BPBD Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut:

a. Koordinasi internal

Dalam organisasi terdapat berbagai bidang yang membawahi tugas masing-masing bidang yang saling bahu membahu bergerak sebagai kesatuan yang utuh demi tercapainya tujuan organisasi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian maka koordinasi antar bidang di BPBD Kabupaten Magelang sudah berjalan baik sebagaimana mestinya dan saling membantu antar bidang satu dengan yang lainnya ketika ada kegiatan. Dalam kegiatan mitigasi bencana yaitu peningkatan sumber daya manusia melalui sosialisasi dan edukasi di KRB III erupsi Gunung Merapi, dilakukan koordinasi dengan melakukan pertemuan antar bidang untuk mendiskusikan mengenai kegiatan tersebut serta dengan adanya jadwal yang terstruktur maka memudahkan dalam melakukan koordinasi. Untuk Kegiatan penyebarluasan informasi kebencanaan khususnya aktivitas Gunung Merapi maka koordinasi dilakukan dari pusdalops yang menerima informasi dari BPPTK kemudian menyebarkannya ke bidang lain dengan melakukan rapat internal maupun melalui WA grup. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa koordinasi antar bidang BPBD Kabupaten Magelang dalam kegiatan mitigasi bencana erupsi dapat dikatakan efektif.

b. Koordinasi eksternal

BPBD Kabupaten Magelang yang melakukan koordinasi dengan pihak luar lainnya agar proses penanggulangan bencana termasuk mitigasi bencana erupsi Gunung Merapi dapat berjalan dengan efektif. Baik dalam kegiatan peningkatan sumber daya manusia masyarakat di Kawasan rawan bencana erupsi Gunung Merapi maupun penyebarluasan informasi kebencanaan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi BPBD Kabupaten Magelang mengadakan rapat koordinasi dengan pihak terkait seperti 10 kluster penanggulangan bencana, masyarakat dengan perwakilan kepala desa atau tokoh masyarakat, TNI/Polri, dan lembaga atau ormas yang ada di desa. mereka saling berkoordinasi dalam kegiatan peningkatan sumber daya masyarakat. Kemudian koordinasi dengan pihak luar dalam kegiatan mitigasi bencana yaitu penyebarluasan informasi kebencanaan erupsi Gunung Merapi dilakukan dengan bekerjasama dengan BPPTKG terkait diseminasi informasi aktivitas Gunung Merapi, BPBD Kabupaten Magelang mendapatkan distribusi informasi mengenai aktivitas Gunung

Merapi. Kemudian di sebarluaskan melalui WA grup atau media lain ke pihak terkait lainnya seperti TNI/Polri, CSR, 10 Kluster, desa rawan bencana merapi. Selain melalui media, koordinasi yang dilakukan untuk penyebarluasan informasi kebencanaan yaitu dengan datang langsung ke desa rawan bencana dan 10 kluster penanggulangan bencana tersebut. dengan seperti itu maka koordinasi yang terjalin juga akan mudah. koordinasi BPBD Kabupaten Magelang dalam hal mitigasi bencana erupsi Gunung Merapi berjalan dengan baik dan terkoordinir dan bisa dikatakan koordinasi dengan pihak luar sudah berjalan efektif.

c. Sosialisasi

Sosialisasi mengenai mitigasi bencana pada tahap pra bencana sehingga dengan adanya informasi yang jelas diterima oleh masyarakat di Kawasan rawan bencana maka masyarakat mampu menerima manfaat tersebut dan dapat mengerti serta mau untuk saling bekerja sama dalam melaksanakan program dari BPBD Kabupaten Magelang demi tercapainya tujuan penanggulangan bencana. BPBD Kabupaten Magelang sudah melaksanakan sosialisasi dengan melakukan pertemuan dengan pihak yang terlibat dalam kegiatan sosialisasi dan telah melaksanakan praktik mengungsi di daerah rawan bencana erupsi Gunung Merapi. Kegiatan sosialisasi juga telah dilaksanakan setiap tahunnya kepada desa-desa rawan bencana di Kabupaten Magelang tak terkecuali KRB III erupsi Gunung Merapi. sosialisasi yang dilaksanakan oleh BPBD Kabup-aten Magelang sudah berlangsung dengan baik dan melibatkan semua elemen masyarakat. Maka dari itu BPBD Kabupaten Magelang sudah dikatakan efektif.

d. Komunikasi internal

Komunikasi internal yang baik akan menciptakan sebuah suasana kerja yang nyaman dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi komunikasi internal antar pegawai dan antar bidang di BPBD Kabupaten Magelang sudah berjalan dengan baik, terlihat komunikasi sudah terstruktur dengan baik antara pimpinan dan bawahan serta pelaksanaan tugas sudah berjalan sesuai dengan tusinya. Selain itu komunikasi antar pegawai pun sudah baik dan sling berkomunikasi satu sama lain jika ada suatu hal yang perlu didiskusikan dan saling berkoordinasi dalam pekerjaan. Komunikasi secara langsung maupun tidak langsung melalui grup WA masih sering terjadi gesekan dan miskomunikasi itu adalah hal yang wajar di dalam organisasi, yang terpenting bagaimana

organisasi tersebut dapat menemukan solusi mengatasi permasalahan tersebut. Walaupun demikian BPBD Kabupaten Magelang masih tetap kondusif dan komunikatif.

e. Komunikasi eksternal

Komunikasi dengan pihak atau organisasi lain yang ikut berperan dalam penanggulangan bencana juga harus berjalan dengan baik. Karena dengan adanya komunikasi kepada pihak luar organisasi maka akan menghadirkan kerjasama yang baik dan terarah, sehingga efektivitas dalam pencapaian organisasi dapat terlaksana dengan baik. komunikasi eksternal yang dilakukan BPBD Kabupaten Magelang dalam penanggulangan bencana khususnya mitigasi bencana Gunung Merapi yaitu peningkatan sumber daya manusia melalui sosialisasi dan edukasi serta penyebarluasan informasi kebencanaan sudah berjalan dengan baik, komunikatif dan efektif. Komunikasi dilakukan secara langsung yang melibatkan seluruh stakeholder dan terlihat adanya kerjasama saling membantu satu sama lain membentuk simbiosis mutualisme. Komunikasi tidak langsung melalui media sosial juga selalu konsisten memberikan informasi kepada masyarakat. Dengan demikian adanya komunikasi yang baik antara BPBD Kabupaten Magelang dan stakeholder terkait dan juga masyarakat akan menciptakan keselarasan tujuan serta terbangun kerjasama yang baik pula.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah Kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Indikator adaptasi organisasi yang dilakukan BPBD Kabupaten Magelang yaitu strategi organisasi dan respon pegawai dalam menghadapi ketidaksesuaian lingkungan serta sarana dan prasarana yang memadai. Apabila BPBD dapat mengatasi ketidaksesuaian yang terjadi dilingkungan maka dapat dikatakan efektif namun apabila tidak, maka organisasi tersebut belum bisa dikatakan efektif.

a. Strategi BPBD

Dalam menjalankan perannya, BPBD seringkali menghadapi ketidaksesuaian kondisi ketika di lapangan. Adapun strategi yang digunakan dalam menghadapi ketidaksesuaian tersebut adalah strategi menghadapi ketidaksesuaian lingkungan dalam kegiatan mitigasi bencana Gunung Merapi baik peningkatan sumber daya manusia melalui sosialisasi KIE dan penyebarluasan informasi kebencanaan dilakukan dengan mengadakan rapat percepatan

internal, monitoring dan evaluasi kembali kegiatan atau program serta kinerja, mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan mitigasi pengurangan risiko erupsi Gunung Merapi.

b. Respon pegawai

Respon pegawai dalam menghadapi kondisi lingkungan yang tidak menentu juga mempengaruhi efektivitas organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tetap sadar akan perannya di BPBD Kabupaten Magelang untuk senantiasa menjalankan tugasnya sebagai garda terdepan penanggulangan bencana, kemudian senantiasa tetap menjalin komunikasi yang baik diantara pegawai maupun pihak luar, tetap bekerjasama dengan baik dan senantiasa menyadarkan masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan penanggulangan bencana mitigasi Erupsi Gunung Merapi yang menjadi salah satu ancaman bencana besar di Kabupaten Magelang.

c. Sarana dan prasarana

Perubahan lingkungan yang akan terus terjadi, peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang kebijakan organisasi yang efektif memang sangat diperlukan. BPBD Kabupaten Magelang mengenai persediaan sarana dan prasarana sudah memadai dan mencukupi. Walaupun ada beberapa kendaraan dan peralatan yang harus bekerjasama dengan pihak lain, tetapi masih memadai untuk menopang pekerjaan, maka bisa dikatakan sarana dan prasarana di BPBD Kabupaten Magelang sudah efektif menopang kegiatan penanggulangan bencana khususnya mitigasi erupsi Gunung Merapi.

3. Faktor pendorong dan penghambat efektivitas BPBD Kabupaten Magelang

- 1) **Karakteristik organisasi:** Ciri organisasi dapat memberikan pengaruh organisasi untuk mencapai tujuannya, terdiri dari struktur hubungan yang sifatnya tetap seperti susunan sumber daya manusia dan pembagian wewenang sesuai kebijakan pergub. ketersediaan pegawai di BPBD Kabupaten Magelang masih dikatakan kurang mencukupi kebutuhan. Untuk pembagian wewenang sudah dilaksanakan sesuai dengan tupoksi yang ada. Selain itu dalam ciri organisasi juga ada bahwa teknologi juga ikut andil dapat berakibat atas tingkat efektivitas, Untuk teknologi yang digunakan, peralatan di BPBD Kabupaten Magelang perlu untuk terus ditingkatkan sehingga jika banyak bencana yang terjadi untuk peralatan yang disediakan sudah cukup tidak harus meminjam kepada pihak lain.
- 2) **Karakteristik Lingkungan:** Ciri lingkungan mencakup dua aspek. Aspek pertama adalah lingkungan eksternal lingkungan yang berada

diluar batas organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi, terutama dalam pembuatan keputusan. Untuk lingkungan luar organisasi masih ada sebagian orang di daerah rawan bencana merapi yang masih minim kesadarannya dalam membantu BPBD Kabupaten Magelang dalam penanggulangan bencana terutama mitigasi bencana Gunung Merapi yakni kesadaran mengungsi jika terjadi erupsi Merapi. Aspek kedua adalah lingkungan internal yang pada umumnya dikenal sebagai iklim organisasi yaitu lingkungan secara keseluruhan dalam lingkungan organisasi yang meliputi macam-macam atribut lingkungan organisasi. Lingkungan di dalam organisasi BPBD Kabupaten Magelang adalah lingkungan pendukung organisasi dengan adanya saling membantu satu sama lain baik antar pegawai maupun antar bidang di BPBD, saling memberi arahan dan dukungan motivasi kepada pegawai di BPBD Kabupaten Magelang.

- 3) **Karakteristik Pekerja:** Ciri pekerja merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Di dalam diri setiap individu akan ditemukan banyak perbedaan, akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan itu sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Pegawai BPBD Kabupaten Magelang senantiasa mengupgrade diri dengan mengikuti pelatihan yang diadakan baik oleh BPBD Kabupaten Magelang maupun pihak luar. Selain itu pegawai BPBD Kabupaten Magelang juga sudah mempunyai jiwa sosial yang tinggi dan selalu siap 24 jam jika dibutuhkan. Bahkan mereka rela mengesampingkan urusan pribadi dan mementingkan pekerjaannya sebagai pegawai BPBD yang senantiasa ada untuk masyarakat terkhusus daerah rawan bencana.
- 4) **Kebijakan dan Praktik Manajemen:** Kebijakan dan praktek manajemen dalam suatu organisasi dapat mempengaruhi efektivitas organisasi. Karakteristik manajemen adalah strategi dan mekanisme kerja yang dirancang untuk mengkondisikan semua hal yang ada di dalam organisasi sehingga efektivitas tercapai penanganan dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. kebijakan dan praktik manajemen bahwa dalam kegiatan penyebaran informasi kebencanaan Gunung merapi sudah dilakukan sesuai dengan SOP yang ada yaitu dalam waktu 5 menit BPBD Kabupaten Magelang harus bergerak cepat dan memang sudah berjalan dengan baik kebijakan tersebut. kebijakan dan praktik manajemen ini terkait kegiatan peningkatan SDM sudah dilaksanakan dengan baik yaitu sesuai dengan rencana kerja yang disusun berdasarkan alokasi dana

APBD dapat terlaksana diawal tahun yaitu peningkatan sumber daya manusia masyarakat dengan sosialisasi KIE di daerah rawan bencana.

Penutup

a. Kesimpulan

Dari hasil penelitian, efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Magelang dapat disimpulkan bahwa, efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam mitigasi bencana erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Magelang sudah cukup efektif walaupun perlu ditingkatkan lagi dalam hal ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, masih minimnya pelatihan untuk semua pegawai, sarana dan prasaran penunjang pekerjaan perlu ditingkatkan serta perlu adanya inovasi baru mengenai program kebijakan penanggulangan bencana termasuk mitigasi bencana dan juga inovasi teknologi. Adapun faktor – faktor Penghambat dan Pendorong Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah:

1. Faktor pendorong Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Mitigasi Bencana Erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Magelang dapat diketahui melalui adanya indikator yaitu karakteristik organisasi, karakteristik lingkungan karakteristik Pekerja, dan karakteristik kebijakan. Faktor pendorong dari karakteristik organisasi yaitu Untuk pembagian wewenang sudah dilaksanakan sesuai dengan tupoksi yang ada. Kemudian untuk karakteristik lingkungan yang menjadi faktor pendorong yaitu faktor dari lingkungan internal yaitu saling membantu satu sama lain baik antar pegawai maupun antar bidang di BPBD, saling memberi arahan dan dukungan motivasi kepada pegawai di BPBD Kabupaten. Magelang. Selanjutnya faktor pendorong di karakteristik pekerja yaitu pegawai dapat meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti pelatihan, mempunyai jiwa sosial yang tinggi, selalu kompak dan siap 24 jam jika dibutuhkan serta mengutamakan keselamatan masyarakat diatas kepentingan pribadi. Faktor pendorong di karakteristik kebijakan dan praktek manajemen yaitu dengan adanya kebijakan SOP 5 menit yang diberlakukan untuk dapat bergerak cepat, tepat dan efisien selain itu ada rencana kerja yang disusun sesuai dengan alokasi dana dimana rencana tersebut dapat dilaksanakn rutin setiap awal tahun.
2. Faktor penghambat efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mitigasi bencana erupsi Gunung Merapi yaitu karakteristik organisasi dan karaktersitik lingkungan. Faktor penghambat dari karakteristik organisasi yaitu ketersediaan pegawai yang kurang mencukupi kebutuhan dan perlu meningkatkan peralatan yang digunakan dalam penanggulangan

bencana termasuk dalam mitigasi bencana erupsi Gunung Merapi karena jika sewaktu waktu memerlukan banyak peralatan yang digunakan tidak perlu meminjam atau bahkan kekurangan. Untuk faktor penghambat dari karakteristik lingkungan yaitu dari lingkungan luar yang meliputi kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam upaya mitigasi bencana bahkan tak jarang yang mengabaikan hal tersebut terutama anak remaja. Adapun saran yang diusulkan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Mengajukan usulan kepada BKD atau pemerintah daerah terkait pengadaan formasi ASN di BPBD, agar struktur jabatan di BPBD Kabupaten Magelang dapat terisi sesuai dengan kebutuhan. Dengan seperti itu maka pelaksanaan penanggulangan bencana dapat terlaksana dengan baik dikarenakan tidak kekurangan sumber daya kompeten.
2. Perlu untuk meningkatkan frekuensi pelatihan dan mengadakan pemerataan pelatihan bagi pegawai mengenai kebencanaan baik itu ASN maupun non ASN. Jadi tidak hanya yang menduduki jabatan tertentu saja yang mendapatkan pelatihan namun semua pegawai bisa dapat mengikuti pelatihan tersebut.
3. Diperlukan inovasi baru program mitigasi bencana yang dapat menarik minat masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut terutama sebagai contoh bazar, pasar masyarakat bahkan event-event besar namun dibalut dengan sosialisasi mitigasi bencana.
4. Menganggarkan untuk pelaksanaan sosialisasi KIE di semua wilayah di Kabupaten Magelang minimal setiap tahunnya ada 50 desa dengan menggandeng semua relawan untuk membantu sosialisasi tersebut.
5. Menganggarkan dana untuk meningkatkan peralatan sarana dan prasarana guna menunjang pekerjaan yang lebih optimal dan tidak bergantung kepada pihak lainnya. Melihat semakin banyaknya bencana yang terjadi di Kabupaten Magelang khususnya erupsi Gunung Merapi yang sudah mulai aktif erupsi kembali.
6. Diperlukan adanya inovasi-inovasi baru terkait dengan teknologi penanggulangan bencana bisa dengan studi banding ke BNPB maupun pihak lain yang sudah dulu mengembangkan teknologi kebencanaan yang dapat mengurangi risiko bencana.

Referensi

- BNPB. 2016. 'Risiko Bencana Indonesia (Disasters Risk of Indonesia)', *International Journal of Disaster Risk Science*, p. 22. Available at: <https://doi.org/10.1007/s13753-018-0186-5>.
- bpbd.magelangkab.go.id. 2019. *Sejarah Pembentukan BPBD*, diakses pada 14 Mei 2022 dari: <https://bpbd.magelangkab.go.id/>

- Carolina, M. 2018. Kelemahan-Kelemahan Penanggulangan Bencana Alam di Indonesia. Buletin APBN oleh Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, III(September), pp. 3–8. Available at: <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/buletin-apbn/public-file/buletinapbn-public-67.pdf>.
- MagmaIndonesia. 2019. *Persebaran Gunung Berapi Di Indonesia*.
- Maumoon Abdul Gayoom. 2010. *Seventh National Development Plan*.
- Nisa, F. 2014. *Manajemen Penanggulangan Bencana Banjir, Putting Beliung, dan Tanah Longsor di Kabupaten Jombang*. JKMP, 107-108
- Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kontingensi Erupsi Gunung Merapi Kabupaten Magelang
- Undang-undang No 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana